

Vol. 4 No. 1 (2023), Halaman 63-74



# GEOGRAPHIA

Jurnal Pendidikan dan Penelitian Geografi

ISSN: 2774-6968

## DISPARITAS PEMBANGUNAN WILAYAH PESISIR (STUDI KASUS KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN)

Hasriyanti<sup>1</sup>, Grace Amanda Rammang<sup>1\*</sup>, Mutmainnah Ali<sup>2</sup>, Susiyanti<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Program Pendidikan Geografi Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, Indonesia

Email: [hasriyanti@unm.ac.id](mailto:hasriyanti@unm.ac.id)<sup>1</sup>, [gracerammang19909@gmail.com](mailto:gracerammang19909@gmail.com)<sup>2\*</sup>, [haliimtjh@gmail.com](mailto:haliimtjh@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[susiyantikismairawan@gmail.com](mailto:susiyantikismairawan@gmail.com)<sup>4</sup>

Website Jurnal: <http://ejournal.unima.ac.id/index.php/geographia>



Akses dibawah lisensi CC BY-SA 4.0 <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

DOI: 10.53682/gjppg.v4i1.7042

(Diterima: 26-06-2023; Direvisi: 27-06-2023; Disetujui: 30-06-2023)

### ABSTRACT

*Coastal areas often have great economic potential because of easy access to natural resources, harbors, tourism, and trade activities. However, in many cases coastal development is uneven, and significant disparity occurs between developed regions and those left behind. The disparity of coastal development refers to significant differences in the development rate between different coastal regions. The problem of coastal development involves a few aspects to consider: development disparity: coastal regions often face disparity between those that have developed and those that have been left behind. Some coastal areas may have experienced significant economic growth and infrastructure development, while others are falling behind and lack access to basic resources and services. This study uses case studies the case study is the coastal region of kab. Pangkajene and islands. The case study method uses development inequality analysis methods. Size to analyze how high regional disparity is by means of the Williamson index (Williamson, 1965). The findings show the county of pangkajene is still below the standards of the provinces and the national. And still, inequality and inequality of people or gini ratio ratio to pangkajene and islands counties.*

**Keywords:** Coastal region, Development, Disparity, Revenue

### ABSTRAK

*Wilayah pesisir sering kali memiliki potensi ekonomi yang besar karena akses yang mudah ke sumber daya alam, pelabuhan, pariwisata, dan aktivitas perdagangan. Namun, dalam banyak kasus, pembangunan di wilayah pesisir tidak merata, dan disparitas yang signifikan terjadi antara wilayah yang maju dan wilayah yang tertinggal. Disparitas pembangunan wilayah pesisir merujuk pada perbedaan yang signifikan dalam tingkat pembangunan antara wilayah pesisir yang berbeda. masalah pembangunan wilayah pesisir mencakup beberapa aspek yang perlu diperhatikan: Ketimpangan pembangunan: Wilayah pesisir sering kali menghadapi disparitas pembangunan antara wilayah yang maju dan wilayah yang tertinggal. Beberapa wilayah pesisir mungkin telah mengalami pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang signifikan, sementara wilayah lain masih mengalami keterbelakangan dan kurangnya akses terhadap sumber daya dan layanan dasar. Penelitian ini menggunakan studi kasus. Studi kasus yang di ambil adalah wilayah pesisir di Kab. Pangkajene dan*

*Kepulauan. Metode studi kasus ini menggunakan metode analisis ketimpangan pembangunan. Ukuran untuk menganalisis seberapa besarnya disparitas antar wilayah/daerah adalah dengan melalui perhitungan indeks Williamson (Williamson, 1965). Temuan penelitian ini menunjukkan Kabupaten Pangkajene masih dibawah standar capaian propinsi dan nasional, serta masih tingginya ketimpangan pendapatan masyarakat atau tingkat capaian gini ratio Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.*

**Kata Kunci:** Wilayah pesisir, Pengembangan, Disparitas, Pembangunan

## PENDAHULUAN

Disparitas pembangunan wilayah pesisir merujuk pada perbedaan yang signifikan dalam tingkat pembangunan antara wilayah pesisir yang berbeda. Wilayah pesisir sering kali memiliki potensi ekonomi yang besar karena akses yang mudah ke sumber daya alam, pelabuhan, pariwisata, dan aktivitas perdagangan. Namun, dalam banyak kasus, pembangunan di wilayah pesisir tidak merata, dan disparitas yang signifikan terjadi antara wilayah yang maju dan wilayah yang tertinggal (Fathoni, 2022).

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan disparitas pembangunan wilayah pesisir. Salah satu faktor penting adalah aksesibilitas. Wilayah yang lebih mudah dijangkau oleh infrastruktur transportasi seperti pelabuhan, jalan raya, atau bandara cenderung lebih maju daripada wilayah yang sulit dijangkau. Selain itu, kebijakan pemerintah, investasi modal, perencanaan pembangunan yang baik, dan dukungan infrastruktur juga memainkan peran penting dalam pembangunan wilayah pesisir (Anugerah, 2021).

Karakteristik geografis juga dapat mempengaruhi disparitas pembangunan wilayah pesisir. Misalnya, wilayah yang terletak di dekat pusat ekonomi atau pelabuhan utama sering kali mendapatkan lebih banyak investasi dan peluang ekonomi daripada wilayah yang terpencil atau terletak di sepanjang pantai yang rawan bencana alam (Jinca & Humang, 2023).

Wilayah pesisir Pangkajene dan Kepulauan terletak di sebelah selatan Pulau Sulawesi, Indonesia. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki garis pantai yang membentang sepanjang sekitar 176 kilometer, meliputi berbagai desa dan kelurahan di sepanjang pantai (MS & Cikka, 2021).

Wilayah pesisir Pangkajene dan Kepulauan terdiri dari berbagai tipe lingkungan pesisir, termasuk pantai berpasir, hutan bakau, terumbu karang, dan muara sungai (Ambeng, 2020).

Selain tempat-tempat wisata, wilayah pesisir Pangkajene dan Kepulauan juga memiliki sektor ekonomi yang beragam, termasuk perikanan, pertanian pesisir, dan perdagangan. Pesisir Pangkajene dan Kepulauan menjadi pusat aktivitas perikanan dengan pelabuhan-pelabuhan nelayan seperti Pelabuhan Paotere dan Pelabuhan Ujung Pandang (Wati, 2018).

Namun, wilayah pesisir Pangkajene dan Kepulauan juga menghadapi tantangan, seperti degradasi ekosistem pesisir akibat pembangunan yang tidak terkendali, kerusakan terumbu karang, serta dampak perubahan iklim seperti peningkatan suhu air laut dan kenaikan permukaan air laut (Jayadi, 2022). Daerah pesisir yang rentan terhadap erosi pantai akibat pengaruh gelombang laut, angin dan arus sehingga dapat mengancam infrastruktur, permukiman, dan ekosistem pesisir.

Pemerintah dan masyarakat Pangkajene dan Kepulauan perlu bekerja sama untuk menjaga keberlanjutan wilayah pesisir, melalui pengelolaan yang berkelanjutan, pelestarian lingkungan, dan pembangunan pariwisata yang bertanggung jawab.

Latar belakang masalah pembangunan wilayah pesisir mencakup beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Ketimpangan pembangunan wilayah pesisir sering kali menghadapi disparitas pembangunan antara wilayah yang maju dan wilayah yang tertinggal. Beberapa wilayah pesisir mungkin telah mengalami pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang signifikan, sementara wilayah lain masih mengalami keterbelakangan dan kurangnya akses terhadap sumber daya dan layanan dasar (Tamboto & Manongko, 2019).

Mengukur disparitas pembangunan dengan mengacu pada indeks disparitas antar wilayah pesisir dan non pesisir di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan memperbandingkan rasio antara pendapatan wilayah dan jumlah penduduk menjadi penting sebagai evaluasi pembangunan.

Kerusakan ekosistem pesisir: Pembangunan yang tidak terkendali dan tidak berkelanjutan di

wilayah pesisir dapat menyebabkan kerusakan ekosistem yang berharga. Misalnya, penebangan mangrove untuk pembangunan, polusi air, kerusakan terumbu karang, dan degradasi habitat laut lainnya dapat mengancam keberlanjutan ekosistem pesisir dan menyebabkan penurunan produktivitas perikanan serta bencana alam yang lebih sering terjadi (Daulay, 2022).

Peningkatan risiko bencana alam: Wilayah pesisir cenderung rentan terhadap bencana alam seperti banjir, badai, dan naiknya permukaan air laut. Perubahan iklim dan pembangunan tanpa pertimbangan mitigasi risiko dapat meningkatkan ancaman terhadap wilayah pesisir dan populasi yang tinggal di sana (Kurniawan, 2022).

Konflik penggunaan lahan: Wilayah pesisir sering menjadi sasaran bagi berbagai kegiatan manusia, seperti pemukiman, industri, pariwisata, pertanian, dan perikanan. Keterbatasan ruang dan sumber daya yang terbatas dapat menyebabkan konflik penggunaan lahan yang kompleks antara sektor-sektor yang berbeda, serta antara kepentingan konservasi dan pembangunan ekonomi (Suryani, 2020).

Ketergantungan ekonomi pada sumber daya alam: Masyarakat pesisir sering kali menggantungkan hidup mereka pada sumber daya alam seperti perikanan dan pariwisata. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, ketergantungan yang berlebihan pada sumber daya alam dapat mengancam keberlanjutan ekonomi dan lingkungan wilayah pesisir. (Lolowang et al., 2022).

Mengatasi masalah pembangunan wilayah pesisir memerlukan pendekatan yang berkelanjutan dan berimbang antara pembangunan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Diperlukan upaya untuk mengembangkan rencana tata ruang yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya yang baik, perlindungan ekosistem pesisir, serta pengembangan kapasitas dan partisipasi masyarakat pesisir dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan wilayah mereka.

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berada pada posisi peringkat ketiga PDRB namun dalam hal mewujudkan Indeks Disparitas Tingkat Hidup Antar Kabupaten (IDHTAK) yang baik belum mampu

mengoptimalkan potensi perekonomiannya yang ditandai dengan peringkat IDHTAK yang menempati posisi kesembilan dari 22 Kabupaten dan 3 Kota yang ada di Sulawesi Selatan. Dengan demikian, perlu penelitian untuk mengkaji disparitas yang lebih spesifik di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan antara daerah pesisir dan non pesisirnya (Hasbi et al., 2018).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian dengan metode studi kasus. Studi kasus yang di ambil adalah wilayah pesisir di Kab. Pangkajene dan Kepulauan. Metode yang digunakan adalah metode analisis ketimpangan pembangunan. Ukuran untuk menganalisis seberapa besarnya disparitas antar wilayah/daerah adalah dengan melalui perhitungan indeks Williamson (Williamson, 1965). Dasar perhitungannya adalah dengan menggunakan PDRB perkapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per daerah dengan rumus:

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum (y_i - \bar{y})^2 \frac{f_i}{n}}}{\bar{y}}$$

$V_w$  - Weighted variation  
 $y_i$  - pendapatan perkapita kecamatan  
 $\bar{y}$  - pendapatan perkapita kabupaten  
 $f_i$  - jumlah penduduk kecamatan  
 $n$  - jumlah penduduk Kabupaten

$$V_{uw} = \frac{\sqrt{\sum (y_i - \bar{y})^2}}{f_i \bar{y}}$$

$V_{uw}$  - unweighted variation

Indeks Williamson merupakan koefisien persebaran (*coefficient of variation*) dari rata-rata nilai sebaran, dihitung berdasarkan estimasi dari nilai-nilai PDRB dan penduduk daerah-daerah yang berada pada lingkungan yang dikaji dan analisis dalam hal ini Kab. Pangkajene dan Kepulauan. Nilai indeks berkisar antara 0 dan 1 yaitu ( $0 < V_w < 1$ ), semakin mendekati nilai 1, berarti terjadi ketimpangan yang semakin tinggi. Sumber data berasal dari BPS, Bappeda, dan pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

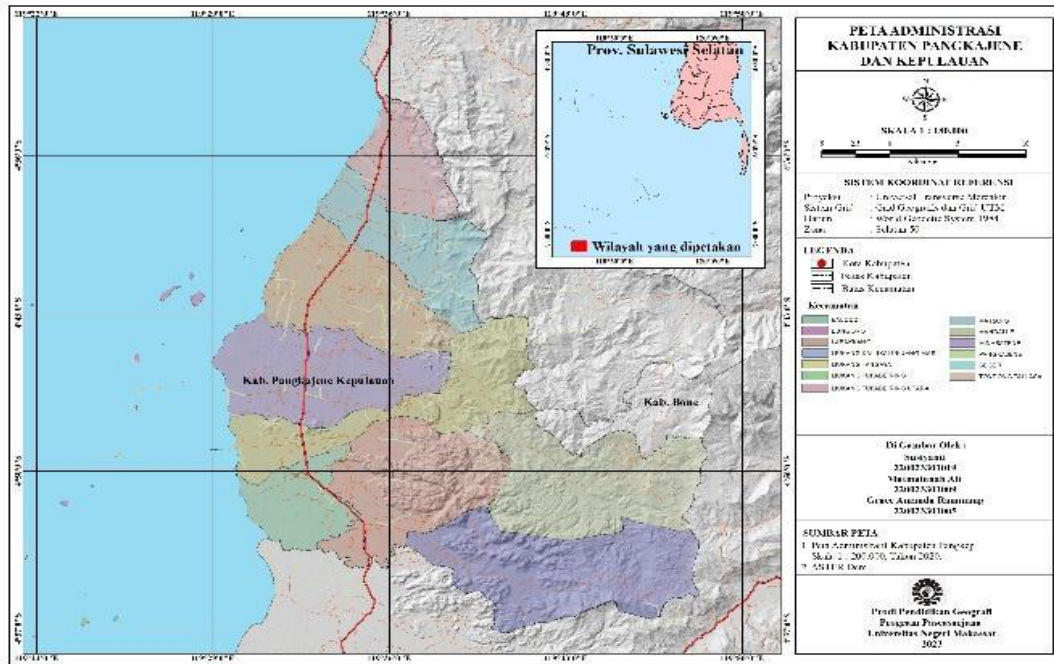
## HASIL PENELITIAN

### Kondisi Wilayah Pangkajene dan Kepulauan

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki luas wilayah 12.362,29 km<sup>2</sup>. Luas wilayah tersebut meliputi daratan seluas 898,29 km<sup>2</sup> dan laut 4 mil seluas 11.464 km<sup>2</sup>. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri

dari 13 kecamatan, dimana 9 kecamatan terletak pada wilayah daratan dan 4 kecamatan terletak

di wilayah kepulauan. Peta lokasi penelitian seperti pada Gambar 1.



Gambar 1. Lokasi Penelitian

Berdasarkan letak astronomi, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berada pada koordinat diantara 4°40'LS sampai 8°00'LS dan diantara 110°BT sampai 119°48'67" BT dengan

jarak tempuh 51 km dari kota Makassar. Adapun kecamatan dan luasnya yang ada di Kab. Pangkajene dan Kepulauan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )
Lk. Tangaya	120.00
Lk. Kalmas	91.50
Lk. Tupabiring	54.44
Lk. Tupabbiring Utara	85.56
Pangkajene	47.39
Minaste'ne	76.48
Balocci	143.48
Tondong Tallasa	111.20
Bungoro	90.12
Labakkang	98.46
Ma'rang	75.22
Segeri	78.28
Mandalle	40.16
Pangkajene dan Kepulauan	1.112,29

Sumber: BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2021.

Wilayah kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri dari, (a) wilayah daratan, terdiri dari: Kecamatan Pangkajene, Kecamatan Balocci, Kecamatan Bungoro, Kecamatan Labakkang, Kecamatan Ma'rang, Kecamatan Segeri, Kecamatan Minasa Te'ne, Kecamatan

Tondong Tallasa, dan Kecamatan Mandalle, (b) wilayah kepulauan, Kecamatan Liukang Tupabiring, Kecamatan Liukang Tupabiring Utara, Kecamatan Liukang Kalmas, Kecamatan Liukang Tangaya.

Ditinjau dari wilayah pesisir dan non pesisirnya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terbagi 2 yaitu: (a) wilayah Pesisir antara lain meliputi : Kota Pangkajene, Kecamatan Liukang Tangaya, Kecamatan Minasatene, Kecamatan Labakkang, Kecamatan Segeri, Kecamatan Mandalle, Kecamatan Bungoro. (b) wilayah non pesisir antara lain : Rilau Ale, Minasatene, Ma'rang, Liukang Kalmas, dan Labakkang bagian pedalaman.

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mempunyai kondisi topografi yang relatif bervariasi secara garis besar dapat dibagi dalam 4 (empat) bagian yaitu: (a) Dataran rendah (0-25 mdpl) sebagian besar terletak di Kecamatan Pangkajene, Kecamatan Minasa Te'ne, Kecamatan Bungoro, Kecamatan Labakkang, Kecamatan Ma'rang, Kecamatan Segeri dan Kecamatan Mandalle, (b) Dataran Tinggi (25-100 mpdl) terletak di sebagian wilayah Kecamatan Balocci, Kecamatan Tondong Tallasa, Kecamatan Segeri, Kecamatan Minasa Te'ne dan Kecamatan Mandalle, terutama dibagian utara, (c) Dataran Pegunungan (500-1000 Mpd), sebagian besar di Kecamatan Balocci, Kecamatan Mandalle, Kecamatan Segeri dan Kecamatan Tondong Tallasa atau pada bagian timur Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. d. Daerah Pesisir terletak di bagian pantai barat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terutama pada Kecamatan

Pangkajene, Labakkang, Ma'rang, Segeri dan Mandalle, serta kecamatan kepulauan yang tergolong sebagai daerah datar terletak pada Kecamatan Liukang Tupabiring, Liukang Tupabiring Utara, Liukang Tangaya, dan Liukang Kalmas.

Penggunaan lahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dijelaskan pada Tabel 2.

Sebagai indikator dari tingkat kesejahteraan masyarakat, IPM masih merupakan tujuan utama pencapaian pembangunan seperti dijelaskan pada Tabel 3.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sejalan dengan beberapa indeks lainnya dimana nilai IPM Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terus mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir dengan besaran masing-masing pada tahun 2018 sebesar 67,71, pada tahun 2019 sebesar 68,29, pada tahun 2020 sebesar 68,72 tahun 2021 sebesar 69,21 poin dan naik 69,79 point pada tahun 2022. Peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan jika dibandingkan dengan 24 kabupaten/kota lainnya maka Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menempati urutan ke 17 dari 24 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, naik 1 peringkat dibandingkan tahun 2020 yang berada pada peringkat 18, (BPS Kab. Pangkajene dan Kepulauan, 2022).

**Tabel 2. Penggunaan Lahan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan**

<b>Penggunaan Lahan</b>	<b>Luas (Ha)</b>
Kawasan Lindung	
Kawasan Hutan Lindung	7.934,540
Kawasan Perlindungan Setempat	1.641,448
Kawasan Konservasi	637.611,348
Kawasan Lindung Geologi	1.504,451
Kawasan Ekosistem Mangrove	2.984,236
Kawasan Budidaya	
Kawasan Hutan Produksi	5.369,943
Kawasan Perkebunan Rakyat	412,093
Kawasan Pertanian	21.192,566
Kawasan Perikanan	1.086.885,99
Kawasan Pertambangan dan Energi	62.765,820
Kawasan Industri	783,076
Kawasan Pariwisata	24.958
Kawasan Permukiman	39.022,072

Sumber: RKPD Kab. Pangkajene dan Kepulauan, 2022.

**Tabel 3. Target Indikator Mikro Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2021-2022**

Indikator Makro	Capaian Tahun 2020	Perkiraan Tahun 2021	Target Tahun 2022
Indeks Pembangunan Masyarakat	68,72	69,59	69,53
Angka Kemiskinan	13,96	13,63	12,68
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,178	5,171	5,05
Pertumbuhan Ekonomi	-1,69	1,0-3,0	5,98-7,60
PDRB/ Kapita	74,8	76,52	76,81
Gini Ratio	0,345	0,339	0,331

Sumber: RKPD Kab. Pangkajene dan Kepulauan, 2022.

Pertumbuhan ekonomi per sektor lapangan pekerjaan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2019-2020 dapat dilihat pada Tabel 4.

**Tabel 4. Laju Pertumbuhan PDRB per Sektor Tahun 2019-2020 (%)**

Kategori	Atas Dasar Harga Konstan		Atas Dasar Harga Berlaku	
	2019	2020	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	16.47	16.91	17.89	18.79
Pertambangan dan Penggalian	9.31	9.52	10.17	10.52
Industri Pengolahan	48.89	47.74	47.72	45.86
Pengadaan Listrik dan Gas	0.06	0.06	0.04	0.04
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0.04	0.04	0.03	0.03
Konstruksi	4.48	5.06	5.24	5.47
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	6.21	6.18	5.58	5.55
Transportasi dan Pergudangan	3.60	3.17	3.11	2.76
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.47	0.44	0.41	0.39
Informasi dan Komunikasi	1.56	2.18	1.37	1.56
Jasa Keuangan dan Asuransi	0.80	0.84	0.80	0.83
Real Estate	1.51	1.65	1.59	1.68
Jasa Perusahaan	0.01	0.01	0.01	0.01
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2.90	2.94	3.12	3.21
Jasa Pendidikan	1.67	1.87	1.66	1.83
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.21	1.37	1.24	1.44
Jasa lainnya	0.04	0.03	0.04	0.03

Sumber: RKPD Kab. Pangkajene dan Kepulauan, 2022.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan meningkat melebihi sektor lain. Perlu penelitian spesifik apakah peningkatan sektor tersebut berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani atau hanya sebatas pada tengkulak.

Pertumbuhan ekonomi berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

dan perbandingannya dengan provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Tabel 5.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari tahun ke tahun mengalami naik turun dimana pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar -1.69 yang disebabkan oleh Covid-19 dan kembali naik sebesar 4.93 di tahun 2022. Tingkat elastisitas terhadap pertumbuhan provinsi rata-rata 1.1 % berarti untuk setiap pertumbuhan ekonomi 1 %

mengangkat pertumbuhan ekonomi Pangkajene dan Kepulauan sebesar 1.1 %. Kenaikan pertumbuhan ekonomi kab Pangkajene dan

Kepulauan terutama disebabkan oleh naiknya produksi yang menyumbang cukup besar yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

**Tabel 5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, serta Provinsi Sulawesi Selatan**

Tahun	Laju Pertumbuhan Ekonomi		Elastisitas Pertumbuhan Ekonomi
	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Pangkajene dan Kepulauan – Prov. Sulawesi Selatan
2017	6.6	7.23	0.91
2018	4.76	7.06	0.67
2019	6.41	6.92	0.93
2020	-1.69	-0.7	2.41
2021	3.46	4.65	0.74
2022	4.93	5,09	0.97
	Rata-Rata Elastisitas		1.1

Sumber: BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2022 (diolah).

Pemanfaatan potensi kelautan paling banyak digunakan untuk produksi perikanan budidaya. Dibawah ini data produksi perikanan budidaya menurut kecamatan dan jenis budaya di

kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2021 yang dijelaskan pada Tabel 6. Pada Tabel 6 pemanfaatan potensi kelautan paling banyak yaitu kecamatan Labakkang dan Ma'rang.

**Tabel 6. Pemanfaatan Potensi Kelautan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2021**

Kecamatan	Budidaya Laut	Tambak	Kolam	Keramba	Jaring apung	Sawah	Jumlah
Pangkajene	585	7.135,71	-	-	-	-	7.720,71
Minasatene	-	2.108,17	53,84	-	-	-	2.162,01
Bongoro	-	6.067,91	-	-	-	-	6.067,91
Labakkang	110.551	7.325,81	-	-	-	-	117.676,81
Ma'rang	98.769	7.750,93	22,88	-	-	-	106.555,81
Segeri	60.540	4.047,61	40,58	-	-	-	64.627,99
Mandalle	27.888	1.123,67	17,50	-	-	-	29.029,17
Balocci	-	-	-	-	-	-	-
Tondong Tallasa	-	-	-	-	-	-	-
Lk Tupabbiring Utara	13.500	424	-	-	-	-	13.924,51
Lk Tupabbiring	2.192	-	-	-	3,40	-	2.195,40
Lk Kalimas	47.870	-	-	-	-	-	47.870,0
Lk Tangaye	75.155	-	-	-	-	-	75.155,0
Jumlah	436.841	35.948,10	134,60	-	3,40	-	472.963,10

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2021.

Taraf hidup masyarakat dapat dilihat dari tingkat persentase kemiskinan. Tingkat kemiskinan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2020 sebesar 13,86% dari target capaian 14,5%-15,8%. Apabila dibandingkan dengan capaian provinsi Sulawesi Selatan sebesar 8,99% dan capaian nasional 7,88% tingkat kemiskinan masih tinggi.

Faktor yang mempengaruhi adalah tingkat pendapatan. Garis kemiskinan tahun 2020

sebesar Rp.358.061,- perkapita, lebih rendah dari provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp.375.463,- dan nasional sebesar Rp.475.477,- . Begitupun dengan gini rasio sebesar 0,345 tahun 2020 (RKPD, 2022).

Disparitas pembangunan di wilayah pesisir dan non pesisir di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan diukur distribusi pembangunan dengan menggunakan koefisien (Williamson Index). Data yang digunakan dalam perhitungan ini adalah pendapatan perkapita

kecamatan dan perkapita kabupaten serta jumlah penduduk kecamatan dan kabupaten. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 7.

Dari Tabel 7 diatas dapat dilihat bahwa jumlah populasi untuk kecamatan di wilayah pesisir sebesar 246114 dan jumlah penduduk di

kecamatan non pesisir sebesar 99661 jiwa, dari 345775 jumlah total penduduk di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan bermukim di wilayah pesisir.

**Tabel 7. Jumlah Penduduk Wilayah Pesisir Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020**

Kecamatan	Jumlah Penduduk		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Pangkajene	23.864	24.792	48.656
Minasatene	19.068	19.872	38.940
Balocci	8.112	8.448	16.560
Tondong Tallasa	4.931	51.68	10.099
Bungoro	21.582	22.297	43.879
Labakkang	24.932	26.684	51.616
Segeri	10.970	11.369	22.339
Mandalle	6.789	7.236	14.025
Total	120.248	125.866	246.114
Kab Pangkajene dan Kepulauan	169.454	176.321	345.775

Sumber : (BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2022).

**Tabel 8. PDRB Perkapita Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2022**

Wilayah	PDRB Perkapita			
	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	77.68	74.38	79.19	86.74
Provinsi Sulawesi Selatan	57.18	55.68	59.65	65.59

Sumber : BPS Sulawesi Selatan, 2022.

Tabel 9 menyajikan indeks Williamson di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk wilayah pesisir dan non pesisir. Dari Tabel 9 menunjukkan indeks  $V_w$  penyebaran pendapatan perkapita yang ditimbang melalui jumlah penduduk kabupaten. Nilai  $V_w$  yang tinggi menggambarkan bahwa terjadi disparitas secara regional. Sementara  $V_{uw}$  menunjukkan

penyebaran persebaran disparitas pendapatan perkapita di dalam suatu wilayah yang lebih rendah yaitu kecamatan. Hasil indeks Williamson menunjukkan tingkat disparitas pendapatan wilayah pesisir lebih tinggi dibandingkan wilayah non pesisir yang berada dalam tingkat kesenjangan sedang.

**Tabel. 9 Indeks Williamson Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pesisir dan Non Pesisir)**

Indeks	Wilayah	Tahun 2020
$V_w$	Pesisir	0.55444
	Non pesisir	0.35281
$V_{uw}$	Pesisir	0.00132
	Non pesisir	0.00208

Sumber: BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2023 (diolah).

**PEMBAHASAN**

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki luas wilayah 12.362,29 km<sup>2</sup>. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Barru

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Maros Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone Sebelah Barat berbatasan dengan Pulau Kalimantan, Pulau Jawa dan



Madura, Pulau Nusa Tenggara dan Pulau Bali. Berdasarkan data BPS tahun 2022 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki 13 kecamatan yaitu kecamatan Liukang Tangaya yang luas daerahnya 120.00 km<sup>2</sup>, kecamatan Liukang Kalmas luas daerahnya yaitu 91.50 km<sup>2</sup>, kecamatan Liukang Tupabbiring luas daerahnya yaitu 54.44 km<sup>2</sup>, kecamatan Liukang Tupabbiring Utara yang luas daerahnya yaitu 85.56 km<sup>2</sup>, kecamatan Pangkajene yang luas daerahnya yaitu 47.39 km<sup>2</sup>, kecamatan Minaste'ne yang luas daerahnya yaitu 76.48 km<sup>2</sup>, kecamatan Balocci yang luas daerahnya yaitu 143.48 km<sup>2</sup>, kecamatan Tondong Tallasa yang luas daerahnya yaitu 11.20 km<sup>2</sup>, kecamatan Bungoro luas daerahnya yaitu 90.12 km<sup>2</sup>, kecamatan Labakkang yang luas daerahnya yaitu 98.46 km<sup>2</sup>. kecamatan Ma'rang yang luas daerahnya yaitu 75.22 km<sup>2</sup>, kecamatan Segeri yang luas daerahnya 78.28 km, dan kecamatan Mandalle luas daerahnya yaitu 40.16 km<sup>2</sup>.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menunjukkan trend yang cukup berfluktuatif dan cenderung melambat. Hal ini ditunjukkan data tiga tahun terakhir, Setelah mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,6 % pada tahun 2017, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 4,76%, dan meningkat lagi pada tahun 2019 sebesar 6,41%. Ditahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengalami penurunan yang sangat drastis sebesar - 1,69%. Perlambatan disebabkan industri pengolahan yang melemah yang mempengaruhi perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Kondisi ini semakin diperparah dengan dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 mengakibatkan penurunan daya beli, penanaman modal sehingga capaian pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran minus 1,69% lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi provinsi yang hanya sebesar minus 0,70%. Dampak lainnya yang ditimbulkan adalah pada laju Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2020 sebesar 5,18%, meskipun melampaui dari target dan capaian ini masih lebih rendah dibandingkan laju Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi yang sebesar 6,31% namun ini persoalan penanganan pengangguran terbuka masih menjadi salah satu prioritas

permasalahan yang harus difokuskan oleh pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Selain itu sektor Produktivitas Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang pengelolaannya masih rendah dan belum optimal dengan capaian kontribusi pada PDRB Tahun 2020 sebesar 18,79%. Hal ini dipengaruhi karena pengelolaan pertanian masih dipengaruhi oleh sawah tadah hujan dan intensif. Sedangkan pengelolaan sektor kehutanan khususnya hutan lindung adalah merupakan kewenangan pusat dan regulasi pemanfaatannya oleh masyarakat juga terbatas.

Pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan pemerataan pendapatan masyarakat melalui pendapatan perkapita dan pembangunan wilayah. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki ketimpangan pendapatan tertinggi kedua di Indonesia (0,429). Hal yang sama juga berimplikasi pada tren ketimpangan pendapatan kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang memiliki kondisi geografis darat, laut dan pegunungan merupakan potensi kekayaan dan keunikan tersendiri. Namun disisi lain berpengaruh pada akses dan mobilitas yang cukup tinggi dan ini akan berdampak pada ketimpangan daerah. Konektivitas dan aksesibilitas wilayah yang cenderung timpang dan perbedaan ketersediaan sarana dan prasarana akan mempengaruhi kehidupan masyarakat khususnya aspek ekonomi dan aspek sosial. Hal ini bisa ditandai dengan belum meratanya sarana dan prasarana pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam mendukung konektivitas wilayah pada distribusi barang dan mobilitas manusia antar daerah, masih kurangnya peran pusat dan infrastuktur antar wilayah juga berkontribusi terhadap ketimpangan wilayah. Kondisi ini ditunjukkan dengan masih minimnya capaian sarana infrastruktur daerah seperti capaian kondisi jalan mantap yang baru mencapai 73,68% dengan rasio per jumlah penduduk sebesar 0,00246. Capaian ini masih rendah bila dibandingkan dengan rasio capaian panjang jalan propinsi dengan jumlah penduduk yang sebesar 0,00344. Ketersediaan Jaringan Irigasi dalam kondisi baik yang baru mencapai 59,54% pada tahun 2020, masih rendah bila dibandingkan dengan capaian propinsi yang sebesar 72,50%. Serta persentase capaian penduduk berakses air mnum tahun 2020 yang hanya sebesar 35,3%, jauh lebih rendah bila

dibandingkan dengan capaian propinsi yaitu sebesar 96%. Selain itu Jumlah Pelabuhan Laut Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 baru memiliki 6 unit, jumlah ini masih sangat kecil bila dibandingkan dengan jumlah pelabuhan laut yang dimiliki propinsi yaitu sebesar 38 unit.

Capaian IKLHD tahun 2020 sebesar 70,247 lebih rendah dari capaian IKLH provinsi sebesar 71,75. Capaian tersebut diakibatkan rendahnya kualitas tutupan lahan, belum optimal intensitas dan efektivitas reboisasi dan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan. Selain pada Indeks Kualitas Lingkungan Daerah (IKLHD), variable Indeks Resiko Bencana juga menjadi sangat penting dan menjadi perhatian dalam mendukung pemeliharaan kualitas lingkungan hidup. Capaian Indeks Resiko Bencana Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada Tahun 2020 sebesar 168,40 dengan kategori tinggi.

Taraf hidup masyarakat dapat dilihat dari tingkat persentase kemiskinan. Tingkat kemiskinan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2020 sebesar 13,86% dari target capaian 14,5%-15,8%. Apabila dibandingkan dengan capaian provinsi Sulawesi Selatan sebesar 8,99% dan capaian nasional 7,88% tingkat kemiskinan masih tinggi.

Faktor yang mempengaruhi adalah tingkat pendapatan. Garis kemiskinan tahun 2020 sebesar Rp.358.061,- perkapita, lebih rendah dari provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp.375.463,- dan nasional sebesar Rp.475.477,-. Begitupun dengan gini rasio sebesar 0,345 tahun 2020 (RKPD, 2022) Dampak dari rendahnya indeks pendidikan dan indeks kesehatan akan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia. Terkait hal tersebut Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam hal kualitas daya saing SDM masih tergolong rendah. Beberapa faktor yang mempengaruhi adalah aksebilitas dan mutu pendidikan yang masih perlu ditingkatkan, perlunya peningkatan peran kegiatan kepemudaan dalam ajang berprestasi baik pada level provinsi maupun nasional, serta perlunya peningkatan akses budaya dan literasi masyarakat.

Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan masyarakat. Hal ini dapat didorong melalui upaya meningkatkan akses

pelayanan kesehatan dengan berfokus pada sasaran pencapaian Total Fertily Raite (TFR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Capaian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2020 untuk masing-masing indikator tersebut yaitu sebesar 2,48 dan 83,68%. Selain faktor kesehatan juga dipengaruhi oleh Kemampuan Daya Beli Masyarakat yang juga masih tergolong rendah. Besarnya dampak covid-19 dari segala sektor mengakibatkan turunnya pendapatan dan daya beli masyarakat. Kondisi ini mempengaruhi tingginya laju inflasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 dengan capaian sebesar 2,04 yang mengikuti laju inflasi capaian Provinsi. Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian nasional masih lebih rendah yang hanya sebesar 1,68. Faktor berikutnya adalah persoalan gender, dimana isu gender pada peta proses pembangunan daerah adalah isu utama khususnya dalam pembangunan sumber daya manusia dengan keberagaman aspirasi dan hambatan kemajuan kelompok masyarakat laki-laki dan perempuan. Beberapa indikator yang dapat mengukur kesetaraan gender adalah pada Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Capain IPG dan IDG Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 masing-masing sebesar 90,61 dan 57,03. Jika dibandingkan dengan capaian IDG provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 yang sebesar 74,78, maka IDG Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tergolong masih rendah. Hal ini menunjukkan keterlibatan pemberdayaan gender baik pada kegiatan bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian masih rendah.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah masih rendahnya pemanfaatan sumber daya pesisir di kabupaten Pangkajene kepulauan. Berdasarkan indeks Williamson, disparitas di wilayah pesisir menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah non pesisir yang masih sedang. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan masih sangat tinggi. Faktor utama yang menyebabkan tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah masih rendahnya tingkat pendapatan masyarakat.

## SARAN

Untuk mengurangi disparitas pembangunan di kawasan pesisir Kabupaten Pangkajene Kepulauan, pemerintah daerah harus mendorong kebijakan pembangunan yang menjawab langsung kebutuhan masyarakat pesisir. Perlu penelitian serupa dengan metode yang berbeda untuk mendapatkan gambaran sebenarnya dari kondisi disparitas wilayah di Kabupaten Pangkajene Kepulauan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ambeng, A. 2020. *Karakteristik Sedimen dan Biodiversitas Ekosistem Mangrove Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan*. Skripsi Program Studi Teknik Kebumihan dan Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin.
- Anugerah, B. 2021. Pembinaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Terdepan di Indonesia dalam Rangka Menegakkan Kedaulatan Nasional. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 16(2), 253–266.
- BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 2021. *BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan*.
- BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 2022. *BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan*.
- BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 2023. *BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan*.
- Daulay, S. R. 2022. *Analisis Potensi Ekonomi Wilayah Pesisir Berbasis Konsep Blue Economy dalam Mewujudkan SDGS Desa (Studi Kasus Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat)*. Skripsi. Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisini Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Dinas Perikanan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 2021. *Dinas Perikanan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan*.
- Fathoni, A. S. 2022. *Analisis Sektor Unggulan dan Disparitas Pembangunan Antar Kecamatan Kabupaten Ponorogo Jawa Timur Tahun 2016-2019*.
- Hasbi, A. M., Semmaila, B., & Mejang, M. 2018. Analisis Disparitas Tingkat Hidup Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Economic Resource*, 1(1), 31–45.
- Jayadi, A. 2022. Tinjauan Yuris Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Ekosistem Terumbu Karang dalam Kawasan Konservasi (Studi Kasus Putusan No. 8/Pid. B/2016/Pn. Pangkajene). *Alauddin Law Development Journal*, 4(2), 294–310.
- Jinca, M. Y., & Humang, W. P. 2023. *Perencanaan dan Pengembangan Transportasi Wilayah Kepulauan*. Nas Media Pustaka.
- Kurniawan, A. 2022. *Strategi Pengelolaan Pesisir Terkait Fenomena Perubahan Garis Pantai Di Kecamatan Rangsang Barat*. Skripsi. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Riau.
- Lolowang, J., Pangemanan, L. R. J., & Memah, M. Y. 2022. Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Pantai Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara (Social Economic Characteristics Coastal Community in Kema District North Minahasa Regency). *Journal of Agribusiness and Rural Development (Jurnal Agribisnis Dan Pengembangan Pedesaan)*, 3(4), 541–547.
- MS, S., & Cikka, H. 2021. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Nilai-Nilai Hukum Adat Pada Masyarakat di Kecamatan Lore Utara dan Lore Piore Kabupaten Poso*.
- RKPD Kab. Pangkajene dan Kepulauan. 2022. *RKPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan*.
- Suryani, N. 2020. Strategi Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Tipologi di Wilayah Kepesisiran Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta. *Jurnal Azimut*, 3(SMAR), 1–8.
- Tamboto, H. J. D., & Manongko, A. A. C. 2019. *Model Pengentasan Kemiskinan*

*Masyarakat Pesisir Berbasis Literasi  
Ekonomi dan Modal Sosial. Malang:  
Makaria Waya.*

Wati, F. W. 2018. *Perkembangan Sosial  
Ekonomi Masyarakat Nelayan di Kelurahan  
Lakkang Kecamatan Tallo Kota Makassar  
(1998-2013)*. Pendidikan Ilmu Pengetahuan

Sosial Program Pascasarjana Universitas  
Negeri Makasar.

Williamson, J. G. 1965. Regional Inequality  
and The Process of National Development:  
A Description of The Patterns. *Economic  
Development and Cultural Change*, 13(4,  
Part 2), 1–84.